

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

¹Sarah Enjelita Simamora, ²Dewi Purnama Sari Br Marbun, ³Fatin Hanifah Zahra, ⁴Asnidar Asnidar, ⁵Ahmad Ridha

¹⁻⁵Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Samudra, Indonesia

Email : dewimarbun14@gmail.com, asnidar@unsam.ac.id, ahmad.ridha@unsam.ac.id

Alamat: Jalan Prof.syarief thayeb. Meurandeh, langsa – Aceh 24416

Korespondensi Penulis: dewimarbun14@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Regional Original Income (PAD) and capital expenditure on economic growth and community welfare in North Sumatra Province from 2009 to 2023. Economic growth is considered an essential indicator in assessing regional productivity, while community welfare is measured using the Human Development Index (HDI), which includes health, education, and purchasing power. This research utilizes secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance. Path analysis examines the direct and indirect effects of PAD and capital expenditure on economic growth and community welfare. The result shows that PAD has a significant positive effect on economic growth and community welfare. Conversely, capital expenditure shows a negative but insignificant effect on economic growth and a positive but insignificant effect on community welfare. This study recommends optimizing capital expenditure and improving PAD management to support more sustainable development.*

Keywords: PAD, Capital Expenditure, Economic, Growth, Welfare.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2023. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator penting dalam menilai produktivitas daerah, sementara kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup Kesehatan, Pendidikan, dan daya beli. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, belanja modal menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya optimalisasi belanja modal dan peningkatan pengelolaan PAD untuk mendukung Pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kata kunci: PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan, Ekonomi, Kesejahteraan.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah (SHELEMO, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan total produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya diukur dalam satu tahun. Ini mencerminkan bagaimana ekonomi berkembang, di mana semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, semakin tinggi pula pendapatan nasional agregat (Nurlina et al., 2024). Pertumbuhan ini penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, dan mendukung investasi dalam berbagai sektor (Priambodo, 2015). Menurut Prasetyo (2009: 237), istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut. pertumbuhan ekonomi daerah menjadi tolak ukur Pembangunan daerah terutama dalam kehidupan ekonomi (Harahap, 2018).

Berdasarkan data Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ketahun bersifat fluktuatif (Naik Turun). Pada tahun 2009 persentase sebesar 5,07%. Dan pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa tahun 2014 jumlah PDRB sebesar 419.573,32 dimana persentase pertumbuhannya mencapai 5,23 %. Dan pada tahun 2015 persentase pertumbuhan ekonomi turun 5,10%. Pada tahun 2016 naik lagi persentase pertumbuhan ekonomi 5,18%. pada tahun 2017 turun lagi menjadi 5,12%, 2018 naik lagi 5,18%. Pada tahun 2019 persentase ekonomi 5,22% naik sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya Pada tahun 2020 persentase pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara menurun menjadi -1,07%. Pada tahun 2021 pertumbuhan persentase pertumbuhan ekonomi naik dari tahun sebelumnya menjadi 2,61%. Dan pada tahun 2022 persentase pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73%. Hal tersebut menunjukkan semakin membaiknya keadaan ekonomi dua tahun pasca pandemik.

Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2023

Tahun	PDRB ADHK (Miliar rupiah)	Pertumbuhan ekonomi Persen
2009	111,559,22	5,07
2010	118,718,90	6,38
2011	126,587,62	6,66
2012	375,924,14	6,45
2013	398,727,14	6,08
2014	419.573,32	5,23
2015	440,955,85	5,10
2016	463.775,46	5,18
2017	487.531,23	5,12
2018	512.762,63	5,18
2019	539.513,85	5,22
2020	533,746,36	-1,07
2021	547.651,82	2,61
2022	573.528,77	4,73
2023	602.235,95	5,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara 2024

Adapun Kesejahteraan Masyarakat merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (Mulia & Saputra, n.d.)

Hubungan antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi semakin erat dikarenakan kualitas hidup yang lebih baik akan berdampak positif pada potensi produktivitas masyarakat dalam mengelola sektor-sektor ekonomi (Nurlina et al., 2023). Masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan memiliki akses yang baik ke berbagai sumber daya ekonomi cenderung lebih produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan kualitas hidup yang lebih baik akan meningkatkan konsumsi, yang kemudian menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, IPM tidak hanya menjadi ukuran kesejahteraan manusia, tetapi juga menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Komariah et al., 2019). Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan seberapa jauh suatu negara telah maju dalam hal pembangunan manusia. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Sumatera Utara:

Berdasarkan data tabel indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 indeks pembangunan manusia sebesar 73,80% dengan indeks pembangunan metode lama. dan pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 67,09%. Dan pada tahun 2011-2013 mengalami kenaikan secara bertingkat. pada tahun 2014 jumlah indeks pembangunan manusia 68,87%. Pada tahun 2015 jumlah indeks pembangunann manusia (IPM) mengalami kenaikan menjadi 69,51% dan pada tahun 2016 jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat menjadi 70,00%. Pada tahun 2017 jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat menjadi 70,57% dan tahun 2018 jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat kembali menjadi 71,18%. Pada tahun 2019 jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatrera Utara sebesar 71,74%. Pada tahun 2020 jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan menjadi 71,77 % dimana pada tahun ini pertumbuhannya hanya sebesar 0,04 persen yang diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) sedikit meningkat menjadi 72%. Dan pada tahun 2022 jumlah Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan kembali menjadi 72,71%.

Tabel 2 nilai indeks Pembangunan manusia di provinsi Sumatera utara Tahun 2009-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2009	73,80
2010	67,09
2011	67,34
2012	67,74
2013	68,36
2014	68,87
2015	69,52
2016	70,00
2017	70,57
2018	71,18
2019	71,74
2020	71,77
2021	72,00
2022	72,71
2023	73,37

Sumber: : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara 2024

Meningkatnya pendapatan asli daerah dapat memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM), Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari daerah sendiri berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Tujuan permodalan daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengoptimalkan sumber daya perekonomian daerah yang dimilikinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini perlu diperhatikan sebagai penerapan prinsip non-diskriminasi kekuasaan daerah dalam pembagian biaya modal. Pendapatan dasar lokal Harus sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Besarnya belanja modal ditentukan oleh besar kecilnya modal daerah. Jadi, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berupaya untuk menyerap pendapatan daerah terlebih dahulu (Adyatama & Oktaviani, 2015).

Menurut Halim (2004:94) dalam (Harahap, 2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk mencapai pendapatan perkapita yang baik, kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus baik pula. Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Upaya penyelenggaraan pemerintah-an dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan data tabel realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Provinsi Sumatera Utara 2009-2023 menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama 15 tahun terakhir. Dalam periode ini, terdapat kenaikan dan penurunan Pendapatan asli daerah (PAD). Puncak penerimaan tercatat pada tahun 2022, dimana realisasi mencapai 7.258,02 miliar rupiah, dengan perkembangan sebesar 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini bisa mencerminkan upaya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya, penerimaan terendah terjadi pada tahun 2009, dengan realisasi sebesar 2.016,07 miliar rupiah, yang bisa dianggap sebagai tahun dasar dalam analisis ini.

Tabel 3 Realisasi Pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera utara tahun 2009-2023

Tahun	Pendapatan asli daerah (milyar)	Perkembangan dalam bentuk (%)
2009	2,016.07	-
2010	2,554.78	26,68
2011	3.578,46	40,08
2012	4.050,76	13,20
2013	4.091,29	1,00
2014	4.416,81	7,96
2015	4.883,88	10,57
2016	4.954,83	1,45
2017	5.287.47	6,72
2018	5.638,96	6,65
2019	5.761,27	2,17
2020	5.531,24	-3,99
2021	6.402,71	15,76
2022	7.258,02	13,36
2023	7.225.69	-0,45

sumber : direktorat jenderal perimbangan keuangan provinsi sumatra utara (djpk) 2024 data diolah

Berdasarkan data tabel 3 menunjukkan data realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Provinsi Sumatera Utara 2009-2023. Pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah di dalam Provinsi Sumatera Utara selama 15 tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari data diatas paling tinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar 7.258,02 dengan perkembangan dari tahun sebelumnya 13,36%. Dan paling rendah terdapat pada tahun 2009 sebesar 2,016.07 dengan tahun dasar.

Di sisi lain, belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Saraswati, 2018). Belanja modal dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik, yang dapat meningkatkan

daya saing ekonomi di daerah. Selain itu, belanja modal juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan di daerah.

Masalah pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal, belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah sampai saat ini. Ini perlu diprioritaskan di masa depan, karena pada kenyataannya, sebagian besar anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, digunakan untuk membelanjakan pegawai daripada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di daerah belum memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik yang rendah (Fajri, 2017).

Belanja modal dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam penelitian sebelumnya terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Pambudy & Syairozi, 2019).

Berdasarkan data tabel 1.4 menunjukkan data realisasi belanja modal pada Provinsi Sumatera Utara 2009-2023. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 15 tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi belanja modal dari data di bawah ini paling tinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 2.629,55 dengan presentasi 48,04 % dan paling rendah terdapat pada tahun 2013 dengan pendapatan sebesar 760,72 dan perkembangan -5,34%.

Tabel 4 Realisasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara 2009-2023

tahun	Belanja modal (Milyar)	Perkembangan dalam bentuk (%)
2009	713.51	-
2010	1.664.32	133,28
2011	1.063,24	-36,12
2012	803,61	-24,43
2013	760,72	-5,34
2014	1.145,97	50,66
2015	932.24	-18,66
2016	1.019,86	9,40
2017	1.919,45	88,22
2018	1.564,90	-18,47
2019	1.249.60	-20,13
2020	1.497,94	19,90
2021	1.141.20	-23,79
2022	1.776,12	55,63
2023	2.629,55	48,04

sumber : direktorat jenderal perimbangan keuangan provinsi sumatra utara (djpk) diolah 2024

Pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan ekonomi

Perekonomian suatu negara dikatakan berkembang jika besarnya kompensasi riil atas penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya, dengan arti pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dengan kapasitas untuk memproduksi suatu barang jasa material selama periode waktu tertentu (Widya et al., 2023). Beberapa teori pertumbuhan ekonomi antara lain: Teori W.W. Rostow W.W. dalam (Mamuka et al., 2019) Rostow banyak membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori pembangunan. Berbagai pemikirannya dituangkan dalam salah satu bukunya yang berjudul *The Stages of Economic, A Non Communist Manifesto*. Dalam buku tersebut, Rostow menggunakan pendekatan sejarah untuk menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat. Menurutnya, dalam suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan, meliputi :

1. Masyarakat tradisional (*traditional society*)
2. Tahap prasyarat tinggal landas.
3. Tahap tinggal landas.
4. Tahap menuju kedewasaan (*maturity*).
5. Tahap konsumsi tinggi (*high mass consumption*).

Teori Harrod-Domar dalam (Suprijati & Yakin, 2017) bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Peneliti Dengan menggunakan pendekatan Aktual Growth Rate (G_n) dan Warranted rate of growth. (G_w). Aktual Growth Rate (G_n) yang artinya laju pertumbuhan terjamin atau pertumbuhan aktual yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian, sedangkan G_w Warranted rate of growth yang artinya laju pertumbuhan alamiah yang oleh Harrod dianggap sebagai “Optimum kesejahteraan yang dapat juga disebut sebagai pertumbuhan potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh”. Dalam pengertian ini G_n dan G_w yaitu untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan menghitung PDRB terhadap harga yang berlaku sebagai G_n dan harga konstan sebagai G_w .

Menurut P. Eko Prasetyo (2009: 237) dalam (Priambodo, 2015), istilah pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets (dalam modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu) dalam (Amdan & Sanjani, 2023).

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena mencerminkan peningkatan output per kapita, yang berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan kesejahteraan. Ketika ekonomi tumbuh, upah riil cenderung meningkat, sehingga standar hidup masyarakat juga membaik. Ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai katalisator dan fasilitator. Artinya, pemerintah tidak hanya berperan dalam merencanakan dan mengatur, tetapi juga menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan (Sulistio, 2011).

Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi apabila terpenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti rumah yang layak, kebutuhan sandang dan pangan yang cukup, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai tingkat kesejahteraan manusia (Pambudy & Syairozi, 2019)

Konsep kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan (Nurlina et al., 2023). Jika kualitas hidup masyarakat meningkat, maka kesejahteraan secara keseluruhan juga akan terwujud. Misalnya, akses terhadap layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang memadai akan membantu masyarakat mencapai potensi terbaik mereka, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Selain itu, lingkungan yang bersih dan aman juga berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih tinggi. Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan, perlu ada upaya terpadu dalam meningkatkan berbagai dimensi kualitas hidup masyarakat (A. P. Putra & Rio, 2022).

Sumber daya manusia adalah modal negara untuk meningkatkan kualitas manusia, di mana orang adalah faktor produksi dan berpartisipasi dalam pengumpulan modal, pembentukan organisasi sosial, ekonomi, politik, dan pelaksanaan pembangunan bangsa (Aini et al., 2018). Menurut Dewi dan Sutrisna (2014:32) dalam (Wijayanti & Darsana, 2015), menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal.

Kesejahteraan sering kali dipandang sebagai pertumbuhan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Banyak negara telah berhasil mencapainya dengan pendekatan ini. Salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya akumulasi modal dan pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut tumbuh dan masyarakatnya mengalami perbaikan dalam taraf hidup (D. A. Putra et al., 2021).

Pendapatan Asli Daerah

(Devita et al., 2014) Salah satu sumber pembelanjaan daerah adalah PAD. Dengan peningkatan PAD, dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan meningkat dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat. Akibatnya, pemerintah daerah akan berusaha untuk mengeksplorasi lebih banyak potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Siregar (2017:32) dalam (Azhar, 2021), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah (Anasta & Nengsih, 2019).

Teori pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran dalam (Asmuruf et al., 2015).

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dapat dianggap sebagai belanja normal dalam kerangka struktur modal yang ada. Dalam hal ini diperlukan belanja modal berupa tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jaringan dan bentuk fisik lainnya. Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk menambah aktiva tetap atau investasi lancar untuk menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini berarti dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal mempengaruhi keadaan keuangan.(Mamuka et al., 2019).

Menurut PSAP Nomor 2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Peningkatan belanja modal diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan PAD. (Priambodo, 2015).

3. METODE PENELITIAN

penelitian ini dilakukan di provinsi Sumatera utara dengan menggunakan data sekunder yang di publikasi oleh badan pusat statistic(bps) dan direktorat jenderal perimbangan keuangan. obyek pada penelitian ini adalah Pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan Masyarakat di provinsi Sumatera utara pada tahun 2009-2023.

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: 1) Variabel terikat (dependent variabel) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi(Y1) dan kesejahteraan Masyarakat (Y2). 2) Variabel bebas (independent variabel) yaitu variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2). Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi(Y1). Pada penelitian ini teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan Eviews 10. Path Analysis adalah teknik analisis yang dipakai untuk menguji pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung variabel-variabel pada penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Substruktural I

Tabel 5

Dependent Variable: LOG(Y1)

Method: Least Squares

Date: 11/04/24 Time: 16:46

Sample: 2009 2023

Included observations: 15

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	0.670703	1.552962	0.431887	0.6735
LOG(X1)	1.725392	0.209788	8.224445	0.0000
LOG(X2)	-0.341122	0.201250	-1.695013	0.1158
R-squared	0.868106	Mean dependent var	12.81278	
Adjusted R-squared	0.846124	S.D. dependent var	0.599090	
S.E. of regression	0.235005	Akaike info criterion	0.118439	
Sum squared resid	0.662730	Schwarz criterion	0.260049	
Log likelihood	2.111705	Hannan-Quinn criter.	0.116931	
F-statistic	39.49120	Durbin-Watson stat	1.964598	
Prob(F-statistic)	0.000005			

Berdasarkan hasil dapat dilihat regresi persamaan substruktural I sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,670703 + 1,725392 X_1 - 0,341122 X_2 + e_i$$

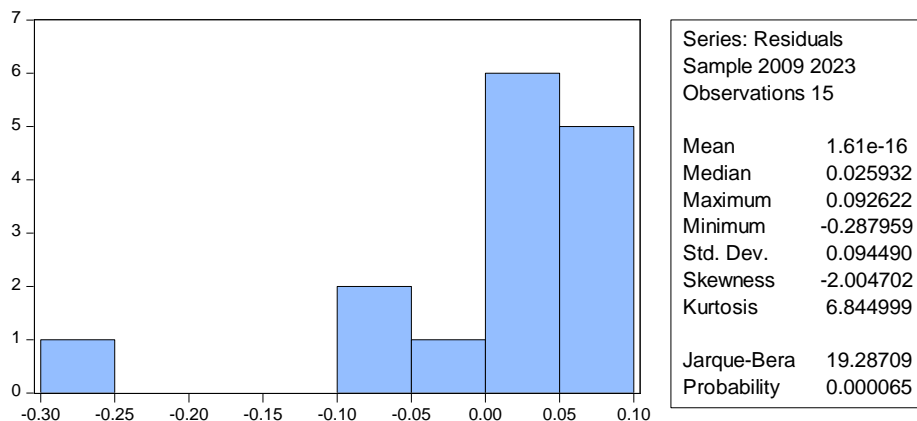
Dari persamaan tersebut dapat interpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 0,670703 menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah dan belanja modal tetap maka pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara sebesar 0,670703
2. Nilai unstandardized coefficients β_1 sebesar 1,725392 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 persen] maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara menurun sebesar 1,725392 dengan asumsi belanja modal tetap (ceteris paribus)
3. Nilai unstandardized coefficients β_2 sebesar -0,341122 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah belanja modal sebesar 1persen maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 0,341122 dengan asumsi pendapatan asli daerah tetap (ceteris paribus)

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Analisi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi persamaan dapat dilihat yaitu adjusted R-squared =0.846124 Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas, yakni variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat sebesar 84,61% sisanya 16,39 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Uji normalitas



Gambar 1

Hasil uji normalitas di atas adalah nilai Jarquer-bere sebesar 19,28709 dengan probabilitas 0,000065 dimana $< 0,05$ (α). Maka dengan demikian bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas.

Tabel 6

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.454872	655.0251	NA
X1	0.044011	854.0448	1.430259
X2	0.040502	559.5423	1.430259

Syarat suatu data dinyatakan tidak korelasi antar variabel independen adalah data yang memiliki nilai VIF variabel independen $< 10,00$. penelitian ini memiliki nilai VIF variabel independen $< 10,00$.sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Hasil Heteroskedastisitas

Tabel 7

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.152301	Prob. F(2,12)	0.8604
Obs*R-squared	0.371326	Prob. Chi-Square(2)	0.8306
Scaled explained SS	0.694529	Prob. Chi-Square(2)	0.7066

hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari level of significance (α), yaitu $0,8306 > 0,05$. Maka hasil keputusannya Hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji hasil Autokelarasasi

Tabel 8

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.149946	Prob. F(2,10)	0.8627
Obs*R-squared	0.436741	Prob. Chi-Square(2)	0.8038

Berdasarkan tabel di atas uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-square lebih besar dari level of significance (α), yaitu $0,436741 > 0,05$. Maka keputusan hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi

Hasil uji substuktural ke II

Tabel 9

Dependent Variable: LOG(Y2)

Method: Least Squares

Date: 11/04/24 Time: 16:57

Sample: 2009 2023

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.928587	0.212169	18.51634	0.0000
LOG(X1)	-0.007457	0.073271	-0.101775	0.9208
LOG(X2)	0.019848	0.030375	0.653439	0.5269
LOG(Y1)	0.019262	0.039136	0.492179	0.6323
R-squared	0.182024	Mean dependent var	4.253786	
Adjusted R-squared	-0.041060	S.D. dependent var	0.031226	
S.E. of regression	0.031860	Akaike info criterion	-3.831738	
Sum squared resid	0.011166	Schwarz criterion	-3.642925	
Log likelihood	32.73804	Hannan-Quinn criter.	-3.833750	
F-statistic	0.815942	Durbin-Watson stat	1.199251	
Prob(F-statistic)	0.511507			

Berdasarkan hasil dapat dilihat regresi persamaan substruk II sebagai berikut:

$$Y2 = -0,007457X_1 + 0,019848X_2 + 0,019262Y_1 + e$$

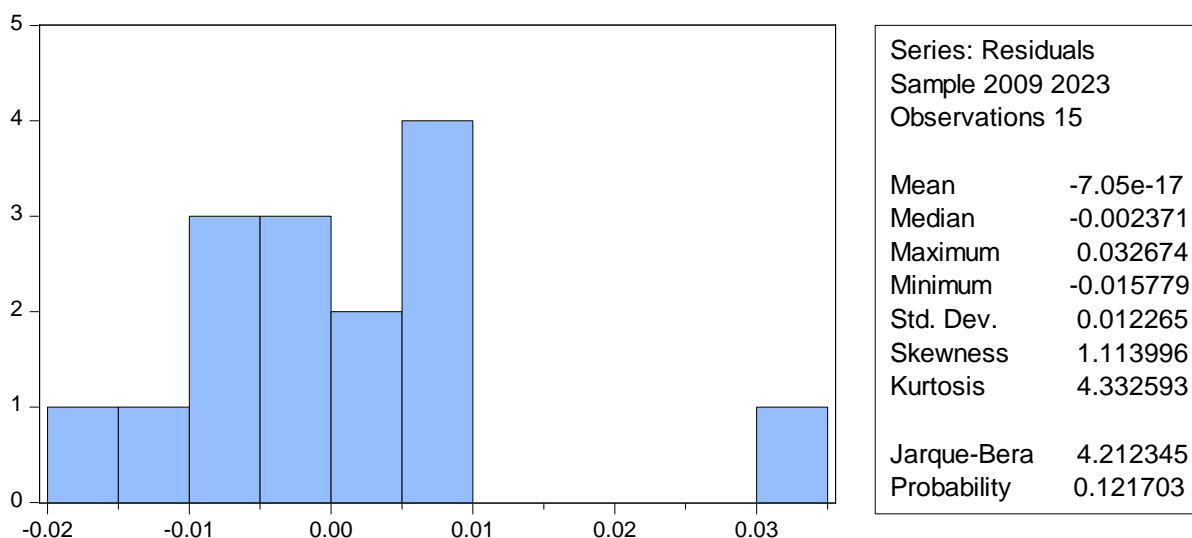
Persamaan diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi koefisien variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar - 0,007457 dan signifikan pada prob $0,9208 > \alpha = 0,05$. Artinya secara langsung pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2). Jika terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (X1) sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat (Y2) di Provinsi Sumatera Utara akan menurun secara tidak signifikan sebesar 0,007457 persen dalam satu tahun, ceteris paribus
2. Hasil estimasi koefisien variabel belanja modal (X2) sebesar 0,019848 dan signifikan pada prob. $0,5269 > \alpha = 0,05$. Artinya secara langsung belanja modal (X2) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2), ceteris paribus
3. Hasil estimasi variabel Pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 0,019262 dan signifikan pada prob. $0,6323 > \alpha = 0,05$ artinya secara langsung pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat di provinsi Sumatera Utara akan menurun secara tidak signifikan sebesar 0,6323 persen dalam satu tahun, ceteris paribus

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi persamaan dapat dilihat yaitu adjusted R-squared -0.041060 Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas, yakni variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat sebesar -04,10% sisanya - 95,90 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Uji normalitas



Gambar 2

Hasil uji normalitas di atas adalah nilai Jarque-bere sebesar 4.212345 dengan probabiliti dimana $> 0,05$ (α). Maka dengan demikian bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal (lolos normalitas), karena nilai probabilitinya lebih besar dari level of significabce (α).

Uji multikolinearitas

Tabel 10

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	0.008490	665.2060	NA
X1	0.005369	5668.139	9.492366
X2	0.000923	693.5099	1.772696
Y1	0.001532	3723.299	7.581898

Syarat suatu data dinyatakan tidak korelasi antar variabel independen adalah data yang memiliki nilai VIF variabel independen $< 10,00$. penelitian ini memiliki nilai VIF variabel independen $< 10,00$. sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji hasil heteroskedastisitas.

Tabel 11

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	4.901912	Prob. F(3,11)	0.0211
Obs*R-squared	8.581199	Prob. Chi-Square(3)	0.0354
Scaled explained SS	7.689589	Prob. Chi-Square(3)	0.0529

hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari level of significance (α), yaitu $0.0354 < 0,05$. Maka hasil keputusannya Hipotesis ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Tabel 12

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.508894	Prob. F(2,9)	0.1362
Obs*R-squared	5.369379	Prob. Chi-Square(2)	0.0682

Sumber data eviews (diolah)

Berdasarkan tabel di atas uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-square lebih besar dari level of significance (α), yaitu $0,0682 > 0,05$. Maka keputusan hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

Pengaruh Langsung (direct effect) Pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total (total effect)

Tabel 13 hasil pengaruh langsung pengaruh tidak langsung dan pengaruh total terhadap variabel.

Hubungan variabel	pengaruh		total
	Langsung	Tidak langsung melalui Y1	
X1-Y1	1.725392		1.725392
X2-Y1	-0.341122		-0.341122
X1-Y2	-0.007457	33.234,500704	33.234.500.7303
X2-Y2	0.019848	-6.570,691964	-6.570,672116
Y1-Y2	0.019262		0.019262

Sumber: eviews 10 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 1.725392
- Pengaruh variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0.341122
- Pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar -0.007457
- Pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.019848
- Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.019262

Pengaruh tidak langsung (Indirect effect)

- Pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 33,234,500
($1.725,392 \times 0.019,262 = 33,234,500$)
- Pengaruh variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,065,706
($0.341,122 \times 0.019,262 = 0,065,706$)

Pengaruh total (total effect)

- Total pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi 33.234.500.7303
($-0.007457 + 33.234,500704 = 33.234.500.7303$)

- Total pengaruh variabel belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi -6.570,672116
(0.019848- 6.570,672116=-6.570,672116)

Besarnya nilai error pada masing masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\beta e_1 = 1 - 0.868106 = 0,131894$$

$$\beta e_2 = 1 - 0.182024 = 0,817976$$

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara variabel yang terbentuk model koefisien analisis jalur. Adapun persamaan substruktur dapat menjadi model koefisien analisis jalur, yaitu sebagai berikut :

Persamaan substruktur I

$$Y_1 = 1.725392 - 0.341122 + 0,131894$$

Persamaan substruktur II

$$Y_2 = -0.007457 + 0.019848 + 0.019262 + 0,817976$$

dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Rm^2 &= 1 - (0,131894^2) (0,817976^2) \\ &= 1 - (0,0173960272) (0,6690847366) \\ &= 1 - 0,0116394163 \\ &= 0,988,360 \\ &= 98,36\% \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,988 menunjukkan bahwa 98,36% informasi yang terkandung dalam data yang di jelaskan oleh model, sedangkan sisanya 1,64% sebesar di jelaskan oleh error dan variabel lain diluar model. angka koefisien pada model ini relatif besar sehingga layak dilakukan interpretasi lebih lanjut.

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa peningkatan PAD memberi dampak langsung dalam mendorong produktivitas daerah dan kapasitas untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan. Selain itu, PAD juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan

masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dapat mendukung pembiayaan program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain, daerah dengan PAD yang kuat lebih mampu menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang bertentangan dengan asumsi bahwa belanja modal seharusnya mendorong aktivitas ekonomi melalui investasi di infrastruktur. Ketidakefisienan dalam alokasi belanja modal mungkin menjadi alasan di balik temuan ini. Misalnya, jika belanja modal lebih diarahkan pada sektor yang tidak memiliki dampak langsung pada peningkatan produktivitas, efeknya pada pertumbuhan ekonomi bisa menjadi minim. Meski demikian, belanja modal tetap menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, PAD terbukti berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Sebaliknya, belanja modal menunjukkan pengaruh yang kurang signifikan, mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk belanja modal disarankan untuk memperkuat pengelolaan PAD dengan mengeksplorasi potensi sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti pengembangan sektor pariwisata dan industri lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini hingga selesai. Terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah menyediakan data sekunder yang sangat berharga sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat konstruktif sepanjang penyusunan jurnal ini. Tak lupa, kami sampaikan penghargaan kepada rekan-rekan serta pihak keluarga yang memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung.

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan, namun kami berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi daerah dan menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Adyatama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank*, 4(19979–4878), 190–205.
- Aini, E. N., Isnaini, I., Sukamti, S., & Amalia, L. N. (2018). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3(1), 58–72. <https://doi.org/10.33050/tmj.v3i1.333>
- Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 108–119. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089>
- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). Peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Profita*, 12(1), 50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019>
- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i2.2255>
- Fajri, A. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i1.18264>

- Harahap, A. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang. *Jurnal Bisnis Net*, 1(1), 1–13. Retrieved from <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/43>
- Komariah, D., Yogiartoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 118–128.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
- Nurlina, N., Ridha, A., & Asnidar, A. (2023). Determinants of human development index in Indonesia period 1990-2021. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 239–250. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7287>
- Nurlina, N., Ridha, A., Syahputra, R., & Muda, I. (2024). Impact of selected macroeconomic on poverty alleviation in Indonesia: Evidence from NARDL approach. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–17. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5166>
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis peran belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 26. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.26-39>
- Priambodo, A. (2015). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. *EDAJ: Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 1–9.
- Putra, A. P., & Rio, A. (2022). Pengaruh good corporate governance, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik. *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains)*, 1(1), 01–19. <https://doi.org/10.38156/worldview.v1i1.116>
- Putra, D. A., Marliyah, M., & Yafiz, M. (2021). Analisis pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan, bancassurance terhadap laba dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat (studi kasus bank syariah di Indonesia). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4085>
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*.
- Widya, W., Fitri, E. A., Setiani, N., Ridha, A., & Asnidar, A. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 167–186. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i1.288>